

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian yang terdahulu yang menggambarkan tentang penemuan-penemuan yang relevan dengan fokus permasalahan yang dikaji peneliti. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan peneliti sehingga permasalahan yang dikaji layak untuk dijadikan topik penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Secara umum penelitian terdahulu adalah sumber terdahulu/lampau dari hasil penelitian seseorang yang nantinya akan dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi yang akan membantu pelaksanaan penelitian. Penelitian terdahulu juga menjadi bahan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut ini tabel yang akan menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori Yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknis Analisis
1	Arinda Agustin	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata	Peran Pemerintah Desa berdasarkan kewenangannya dalam pengembangan Desa Wisata. a. Desa sebagai <i>Local Self Government</i> b. Desa sebagai <i>Self Governing Community</i> . Dalam pengembangan Desa Wisata penulis melakukan analisis yang berkaitan dengan teori dari Yoeti (2002:211) tentang 3A sebagai pengembang pariwisata, meliputi : a. Daya Tarik (<i>Attraction</i>) b. Aksesibilitas (<i>Accessibilty</i>) c. Fasilitas (<i>Amenities</i>)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, Inti sari Dokumen, Pita Rekaman.

2	Nurdiyanti	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Gili Dewa Kecamatan Tarano	1. Mengikuti sertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. 2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan. 3. Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal. Teori Sunaryo Hayat (2018: 39)	Kualitatif	Deskriptif	Data Sekunder yang berupa arsip pemerintah Desa Labuhan Jambu, data berupa dokumentasi obyek wisata dan rekaman dalam wawancara penelitian. Data Primer melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.
3	Reta Amelia Putri	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Tangkas Desa Tanjung Lanjut, Kabupaten Muaro Jambi	Menurut A Yoeti Oka 1. Fasilitas transportasi 2. Fasilitas akomodasi 3. Fasilitas Catering Service 4. Obyek dan atraksi wisata 5. Aktivitas rekreasi 6. Fasilitas pembelanjaan 7. Tempat makan atau toko	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, observasi dan dekumentasi

4	Firman Syah	Strategi Mengembangkan Desa Wisata	Widjaja (2011) menjelaskan Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Ini berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.	Kualitatif	Studi Pustaka	analisis eksplanasi terhadap kebijakan pemerintah tentang pariwisata, terutama Desa wisata.
---	-------------	------------------------------------	---	------------	---------------	---

2.1.2 Kajian Terhadap *Grand Theori*

2.1.2.1 Pengertian Administrasi

Menurut **Leonard D. White**: Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar dan kecil.

Menurut **H.A Simon**: Administrasi adalah kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama.

Menurut **William H. Newman**: Administrasi adalah bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan atas usaha-usaha kelompok individu, terhadap tercapainya tujuan bersama.

2.1.2.2 Pengertian Administrasi Publik

Menurut **Indriadi (2006:01)** mengatakan administrasi bahwa

Kata “administrasi” yang di kenal di Indonesia menurut **Indriadi (2006:01)** berasal dari kata *administrate* (Latin: *ad* = pada, *ministrare* = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti “memberikan pelayanan kepada”. Ketiga istilah ini, yaitu *administrare* (Latin), *administration* (Inggris), dan *administratie* (Belanda) mempunyai pengertian yang berbeda. *Administrare* berarti adalah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberi tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepadanya, sedangkan *administration* adalah suatu kegiatan yang mempunyai makna luas meliputi segenap aktivitas untuk menetapkan kebijakan serta pelaksanaannya, *administratie* adalah suatu kegiatan yang bersifat hanya sebatas mencatat atau ketatausahaan.

Menurut **Chandler & Plano dalam Keban (2004:3)**, mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut **Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (1960)**, Administrasi Publik merupakan pekerjaan yang ada di pemerintah yang di dalamnya melakukan kekuasaan politiknya,

Menurut **Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (1970:21)** bahwa mendefinisikan administrasi publik adalah

- (1) suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan,
- (2) Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan serta hubungan di antara mereka,

(3) Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik,

(4) Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

(5) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Adapun menurut **Yogi (2011)** mengatakan bahwa

Menurut Yogi (2011) kata “Publik” merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris “*public*” bahasa ini sudah digunakan bertahun-tahun oleh masyarakat bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa publik ini diidentikkan dengan masyarakat. Kata masyarakat ini dalam pengertian umum menyatakan semua kalangan umum yang ditunjukkan pada keseluruhan rakyat. Nama publik juga sering kita dengar dengan nama di Kamaruddin Sellang, S.Sos., M.A.P. belakangnya yang menegaskan bahwa kata yang di depannya adalah dimiliki oleh publik. Sebagai contoh kita sering dengar nama;

a. Toilet publik (*public toilet*)

b. Pelayanan publik (*public service*)

c. Kebijakan publik (*public policy*)

d. Transportasi publik (*public transport*)

e. Lembaga Publik (*public institution*)

f. Republik (*republic*)

g. Dan sebagainya Contoh-contoh dari nama yang diakhiri publik ini sangat banyak yang merujuk pada akhiran yang

sebenarnya dari kaidah bahasa Indonesia merujuk kepada kepemilikan.

Sebagai contoh kata “*republic*” yang artinya kembali ke publik, semua persoalan dikembalikan kepada publik atau publik sebagai penguasa tertinggi. Publik di sini berarti masyarakat madani baik itu pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari publik atau sekelompok masyarakat yang diberi kewenangan untuk menjalankan amanah publik. Publik sendiri merupakan padanan yang tepat jika disandingkan dengan administrasi untuk merujuk pada pengelolaan bersama kepentingan publik (Yogi, 2011).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan catat mencatat, merencanakan, mengkoordinasi dan melakukan pengelolaan kegiatan yang ada di dalam pemerintahan.

a. Peran Administrasi Publik

Menurut Gray (1989:15-16), peran administrasi publik :

1. Menjamin pemerataan distribusi pendapatan Nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.
2. Melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk

melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan, dan lain-lain.

3. Berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi dari generasi ke generasi.

2.1.3 Kajian Terhadap *Middle Theori*

2.1.3.1 Strategi Sumber Daya Manusia

Hanya sumber daya manusia yang memiliki motivasi, perasaan, keinginan, kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan karya (rasio, rasa, dan karsa).

Strategi sumber daya manusia menurut **Wether dan Davids (1996)**, menyatakan bahwa :

“Sumber daya manusia yaitu karyawan yang siap, cakap, dan waspada untuk mencapai tujuan organisasi. Nawawi menyebutkan terdapat tiga penjelasan sumber daya manusia, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia yaitu manusia yang berkegiatan di dalam lingkungan organisasi (disebut seperti personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)
2. Sumber Daya Manusia yaitu yang mempunyai potensi manusiawi dalam organisasi yang menunjukkan keberadaannya.
3. Sumber Daya Manusia yaitu potensi yang mempunyai aset yang mempunyai manfaat sebagai modal (Non Material/Non Finansial) di sebuah organisasi bisnis yang bisa dilakukan menjadi potensi yang nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam menunjukkan keberadaannya pada organisasi.”

2.1.3.2 Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

2.1.3.3 Pariwisata

Pariwisata menurut **yoeti (1996 : 112)** menyebutkan

“Sesungguhnya, pariwisata telah lama menjadi perhatian, baik dari segi ekonomi, politik, administrasi kenegaraan, maupun sosiologi, sampai saat ini belum ada kesepakatan secara akademis mengenai apa itu pariwisata. Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa *Sansekerta* yang terdiri atas dua kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan *wisata* berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*tour*”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata “Kepariwisataan” dapat digunakan kata “*tourisme*” atau “*tourism*”(Yoeti, 1996:112).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Pada Musyawarah Nasional II Pariwisata di Tretes, Jawa Timur, kata pariwisata pertama kali digunakan pada tahun 1959. Istilah ini digunakan

sebagai pengganti kata *Turisme* sebelum kata *pariwisata* diadopsi dari bahasa *Sansekerta*.

Menurut **E. Guyer Freuler** mengatakan bahwa

“Kata *pariwisata* di dalam pengertian modern yaitu tanda dari jaman saat ini yang mendasarkan dalam kebutuhan Kesehatan dan perubahan hawa, nilai yang sadar dan meningkatkan kecintaan ini dikarenakan oleh pergaulan dari berbagai bangsa dan tingkat masyarakat.”

Menurut **Prof. Salah Wahab**, bahwa *pariwisata*

“*pariwisata* yaitu kegiatan manusia yang dikerjakan dengan ingat dan memperoleh bantuan dari beberapa orang dengan silih berganti dengan beberapa orang yang ada dalam negeri tersebut (di luar negeri), dengan tempat warga negara dari tempat yang berada di negara tersebut, di dalam sebuah negara atau benua dengan jangka waktu untuk mendapatkan kebahagiaan yang bermacam-macam dan mendapatkan hal yang lain dari hal yang pernah ditemuinya sebelumnya di tempat kerja.”

Soekadijo (1996) mengatakan *pariwisata* yaitu petunjuk canggih di masyarakat, karena termuat hotel, objek wisata, *souvenir*, pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, tempat makan, dan lain-lain.

Spillane (1987) mengatakan *pariwisata* merupakan

“Kegiatan yang melakukan perjalanan berpindah tempat dari lokasi satu ke lokasi yang lain, yang tentatif, dilaksanakan sendiri atau beregu, untuk mendapatkan keselarasan atau kesenangan bersama dengan makhluk hidup, dengan aspek sosial, budaya, ilmu dan alam.”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata merupakan kegiatan manusia dilakukan oleh perorangan atau dengan beberapa orang dengan cara berpindah tempat melakukan perjalanan agar mendapatkan kebahagiaan.

2.1.3.3.1 Jenis-jenis Pariwisata

Spillane (1987) menyebutkan pengertian dan jenis-jenis pariwisata bahwa

“Orang berkegiatan dengan cara melaksanakan kegiatan wisata ke satu daerah yaitu orang tersebut mempunyai keinginan melakukan *refreshing* dan atau hanya untuk jalan-jalan. Ataupun ada yang melaksanakan perjalanan wisata dengan adanya urusan bisnis ke satu daerah. Beberapa jenis pariwisata dapat dikelompokkan dengan dasar tujuan atau konsep perorangan atau beregu dalam kegiatan berwisata.

Ini adalah jenis-jenis pariwisata menurut pendapat **Spillane (1987)** :

1. Pariwisata yang Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Orang-orang terlibat dalam jenis pariwisata ini ketika mereka bepergian jauh dari rumah untuk liburan, mencari udara segar, untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka, untuk menenangkan saraf mereka, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menghargai keindahan alam, atau bahkan untuk menemukan kedamaian dan relaksasi. ketenangan pinggiran kota.

2. Pariwisata dilakukan untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)

Orang-orang yang ingin memanfaatkan waktu luangnya untuk beristirahat, memperbaharui vitalitas jasmani dan rohaninya, serta menyegarkan kembali kepenatan dan keletihannya terlibat dalam jenis wisata ini.

3. Pariwisata dilakukan untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilaksanakan karena individu tertarik untuk mempelajari tentang tradisi, institusi, dan cara hidup masyarakat di tempat lain, serta mengunjungi situs sejarah, galeri seni, bangunan keagamaan, dan festival. berbagai acara seperti tarian tradisional, musik, teater, dan festival seni.

2.1.4 Kajian Terhadap *Operasional Theori*

2.1.4.1 Pemerintah Desa

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa :

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 4 Tahun 2007 :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

4 Tahun 2007 :

“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Adapun menurut **Saparin (1979, h.21)** menyatakan bahwa

“Pemerintah Desa merupakan representasi resmi dari kesatuan masyarakat Desa. Pemerintah Desa dibentuk di bawah pimpinan seorang Kepala Desa dan para pembantunya (perangkat Desa), yang bertindak sebagai wakil masyarakat dalam segala interaksi internal dan eksternal dengan masyarakat yang bersangkutan. Menurut pandangan pemerintah Desa dalam situasi ini, peran pemerintah Desa adalah untuk mengontrol kepentingan masyarakat sesuai dengan keadaan sosial budaya daerah, dan sebagai hasilnya, posisi Desa menikmati otonomi yang sebenarnya.”

“Pemerintah Desa bertugas mengelola sumber daya publik, termasuk memungut pajak dari masyarakat. Ini adalah bagian dari birokrasi pemerintah kontemporer. Desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan Desa yang merupakan salah satu komponen sistem penyelenggaraan pemerintahan. **“(Widjaja, 2004:3).**”

Menurut Nurcholis (2011:68) mengatakan :

“Status Desa adalah satuan pemerintahan di bawah Kabupaten atau Kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanya wilayah kerja lurah di bawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.”

Sedangkan pengertian pemerintahan Desa yaitu Organisasi pemerintahan yang terendah yang merupakan *Grass root* dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki empat tipe kewenangan antara lain: pertama, Kewenangan *Generic* (asli) sering disebut hak atau kewenangan asal-usul yang melekat pada Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (*self governing community*); kedua, kewenangan *devolutif*, merupakan kewenangan yang melekat

pada Desa karena posisinya ditegaskan sebagai pemerintah lokal (*local self government*); ketiga, kewenangan distributif yakni kewenangan bidang pemerintahan kepada Desa; keempat, kewenangan negatif yaitu kewenangan Desa menolak tugas pembantuan dari pemerintah jika tidak disertai oleh penduduknya atau jika tugas tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat (**Sabtoni, 2005:20**).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Desa adalah yang mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di Desa masing-masing yang mengatur dan mengurus kepentingan yang terapat dalam masyarakat.

2.1.4.2 Pengembangan Pariwisata

Munasef (1995:1) menyatakan Pengembangan industri pariwisata mencakup semua tindakan dan upaya terkoordinasi untuk menarik wisatawan, serta penyediaan sarana, prasarana, dan barang dan jasa yang diperlukan.

Menurut **Pearce (1981:12)** Ungkapan ‘usaha melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat’ dapat digunakan untuk menggambarkan pembangunan pariwisata.

Sugiama (2014:72) mengungkapkan bagian yang pendukung dalam wisata yaitu bagian kepariwisataan wajib hadir dalam destinasi wisata. ada beberapa bagian dari kepariwisataan yaitu 4A, *Attraction, Amenities, Ancilliary* dan *Accesibility*. Adapun

ahli **Hadiwijoyo (2012:69)** menyebutkan unsur pengembangan pariwisata muncul yaitu *Attraction* dan *Accommodation*. *Attraction*, semua aktivitas masyarakat dan elemen lingkungan fisik Desa yang memungkinkan pengunjung untuk berpartisipasi secara aktif, seperti pelajaran menari, kelas bahasa, dan topik khusus lainnya (**Nuryati, 1993: 1-2**). *Accommodation, homestay* yang merupakan bagian dari rumah penduduk atau bangunan yang dibangun mirip dengan rumah penduduk.

Sedangkan **Brown dan Stange (2015)** mengatakan dibukunya yang berjudul *Tourism Destination Management* mengatakan terdapat beberapa unsur yang ada di pengembangan pariwisata *Attraction, Activity* dan *Accesibility* (3A).

Dan mengatakan **Buhalis (2000:98)** mempunyai teori yang tidak sama bahwa unsur pengembangan pariwisata yaitu 6A yang terdiri dari *Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities* dan *Available Package*.

Pengembangan pariwisata memiliki peran signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi, sektor pariwisata mengontribusi devisa dari kunjungan wisatawan manca Negara dan Produk Domestik Bruto (PDB) beserta komponen-komponennya. Aspek sosial, pariwisata berperan dalam penyerapan tenaga kerja, apresiasi seni, tradisi dan budaya bangsa. Aspek lingkungan, pariwisata khususnya ekowisata dapat mengangkat produk dan jasa wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni lainnya (**Nugroho, 2011:1**).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan pariwisata merupakan melakukan upaya dalam meningkatkan fasilitas dan juga pelayanan dalam setiap destinasi wisata alam agar dapat menjadikan terwujudkan pengembangan pariwisata.

2.2 Kerangka Berpikir

Pada kerangka pemikiran ini peneliti akan membahas objek penelitian dan objek permasalahan tentang Strategi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Desa Baros Kabupaten Bandung, yang seharusnya adalah pariwisata di Desa dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan berkembangnya zaman sumber daya aparatur pemerintah Desa harus mempunyai strategi dalam meningkatkan pengembangan pariwisata Desa seperti dengan mudah mendapatkan semua informasi tentang wisata daerah Desa Baros, terdapat banyak *homestay* atau tempat tinggal penginapan didaerah tersebut, dan mempunyai daya tarik wisata daerah tersendiri. Maka dengan mempunyai strategi sumber daya aparatur pemerintah Desa dapat memperoleh hasil baik dengan meningkatnya perkembangan pariwisata di Desa tersebut.

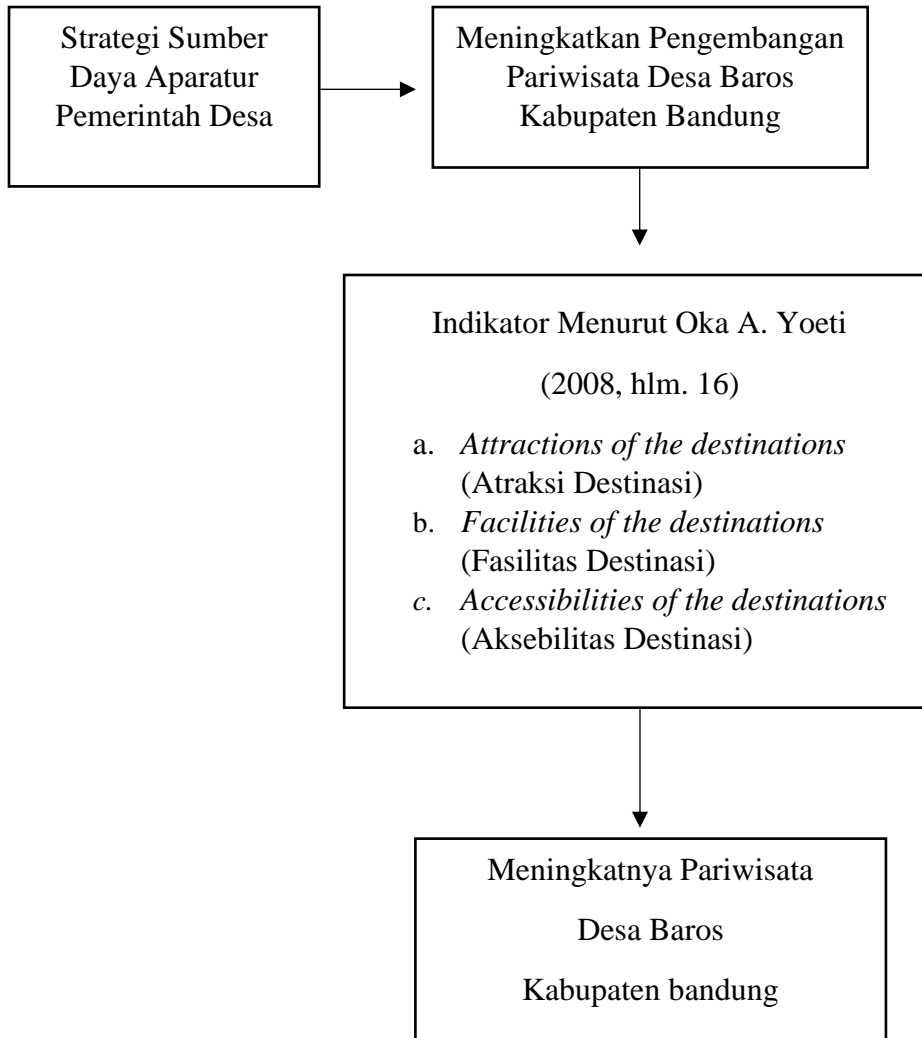
Dari paparan kerangka berpikir di atas, peneliti meninjau maka harus meningkatkan pengembangan pariwisata. Untuk mengukur strategi sumber daya aparatur Desa dalam meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Baros Kabupaten Bandung pada penelitian ini menggunakan teori pengembangan

pariwisata dari ahli menurut **Oka A. Yoeti (2008, hlm. 16)**, terdapat tiga unsur penting yang membentuk pariwisata, yaitu:

a. *Attractions of the destinations* atau atraksi wisata salah satu unsur dalam produk pariwisata yang dapat menarik pengunjung ke suatu lokasi wisata adalah atraksi wisata. Negara, kota, atau tujuan wisata menarik pengunjung karena semua tujuan dan atraksi yang tersedia. Sumber daya alam, sumber daya budaya, taman hiburan, acara olahraga, dan aktivitas semuanya termasuk dalam kategori ini.

b. *Facilities of the destinations* yaitu setiap jenis fasilitas yang memenuhi kebutuhan wisatawan selama mereka tinggal di atau mengunjungi tempat wisata, termasuk hotel, motel, restoran, ... , kafe, pusat perbelanjaan, dan toko industri. Bisnis ini menawarkan layanan ketika pelanggan pergi ke suatu tempat tujuan wisata.

c. *Accessibilities of the destinations* kelompok ini mencakup *airport*, *seaport*, dan *water supply*. Pada dasarnya, semua infrastruktur yang memudahkan orang untuk melakukan perjalanan ke suatu lokasi wisata; tanpa itu, pariwisata sebagai industri tidak dapat tumbuh.

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh peneliti

2.3 Proposisi

Dengan rumusan masalah, peneliti mendasarkan pada Strategi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Desa Baros Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. Strategi sumber daya aparatur pemerintah Desa dalam meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Baros Kabupaten Bandung berjalan dengan optimal dalam pengembangan pariwisatanya karena dilihat dari penelusuran melalui internet *website* bahwa banyaknya dokumentasi-dokumentasi tentang pariwisata di Desa Baros Kabupaten Bandung akan tetapi desa tersebut masih ada yang harus dikembangkan kembali.